

## Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Defisit Rp 1,5 Triliun Lebih



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/08/01/IMG20240801103505.jpg.webp>

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor mengungkapkan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsinya defisit atau selisih kurang Rp1,5 triliun lebih.

Hal itu terungkap ketika menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD 2024 pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Kamis.

Dalam KUA-PPAS perubahan APBD Kalsel yang dibacakan Sekdaprov setempat, Roy Rizali Anwar, bahwa Pendapatan Daerah Rp11,4 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11,4 triliun lebih.

"Defisit anggaran pada perubahan APBD 2024 tersebut akan ditutup dengan pembiayaan," ujar orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel tersebut.

Pendapatan Daerah pada rencana perubahan APBD Kalsel 2024 mengalami kenaikan lebih kurang Rp1 triliun bila dibandingkan dengan APBD murni yaitu dari Rp10 4 triliun menjadi Rp1,4 triliun lebih.

Begitu pula Belanja Daerah pada rencana perubahan APBD Kalsel 2024 mengalami kenaikan dari APBD murni yaitu dari Rp11,5 triliun lebih menjadi Rp13,1 triliun.

Usai rapat paripurna berlanjut pembahasan rencana perubahan APBD Kalsel 2024 tersebut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim APBD pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang diketuai Sekdaprov.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kepala Daerah Provinsi Kalsel setuju bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel dan Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Setda Kalsel, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T. pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (2/9/24) siang.

Sebelumnya, ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel, Dr. (H.C.) H. Supian HK, S.H., M.H. melalui salah seorang anggotanya yakni, H. Swardi Sarlan, S.Ag. menyampaikan laporan Banggar sesuai dengan agenda Rapat Paripurna.

Perubahan APBD ini, menurut Banggar DPRD Kalsel, dilakukan sebagai upaya untuk menjaga capaian target yang telah ditetapkan, mengoptimalkan belanja yang dilaksanakan, penyesuaian dengan perubahan kebijakan yang berkembang, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri, serta penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah yang terjadi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bermuara pada kesejahteraan rakyat Banua, berikut empat fokus pembangunan Provinsi Kalsel Tahun 2024 antara lain, 1. Peningkatan sumber daya manusia (sdm) pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan kesempatan kerja; 2. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas; 3. Struktur perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi umkm; 4. Hilirisasi industri, pertanian, pariwisata menuju investasi ekonomi hijau.

“Berdasarkan hal di atas, Banggar sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melakukan pembahasan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan TAPD Provinsi Kalsel telah merampungkan seluruh proses dan mekanismenya sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) T.A. 2024 pada hari ini siap untuk diambil suatu keputusan,” ujar Swardi Sarlan membacakan laporan Banggar.

## **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/423143/rencana-perubahan-apbd-kalsel-2024-defisit-rp15-triliun-lebih>, Rencana perubahan APBD Kalsel 2024 defisit Rp1,5 triliun lebih, (01/08/2024).

2. <https://dprdkalselprov.id/legislatif-dan-eksekutif-setujui-bersama-raperda-tentang-perubahan-apbd-t-a-2024/>, Legislatif dan Eksekutif Setujui Bersama Raperda tentang Perubahan APBD T.A. 2024, (02/09/2024).

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Laporan realisasi semester pertama menjadi dasar perubahan APBD.
- 2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d) keadaan darurat; dan/atau
  - e) keadaan luar biasa